



POLICY BRIEF

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian

PERTANIAN INDONESIA DI CERMIN GLOBAL: MENAJAMKAN PRODUKTIVITAS, RESILIENSI SISTEM PANGAN, LOGISTIK, DAN GIZI¹

PENDAHULUAN

Penilaian terhadap pembangunan pertanian Indonesia selama ini sering bertumpu pada indikator yang bersifat internal, terutama produksi, luas tanam, produktivitas komoditas, atau realisasi program. Ukuran-ukuran tersebut tetap penting, namun belum mencerminkan daya saing kinerja pembangunan pertanian Indonesia bila dibandingkan dengan negara lain. Di sinilah indeks global menjadi relevan; bukan untuk mengecilkan capaian nasional, melainkan untuk memberi cermin pembanding yang lebih obyektif agar Indonesia mempunyai dorongan untuk senantiasa memperbaiki kinerja pembangunan pertanian secara berkelanjutan. Melalui pembandingan lintas negara, terlihat lebih jelas bahwa meskipun kemajuan telah dicapai, sektor pertanian Indonesia masih memerlukan dorongan kuat agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik, lebih tangguh, dan lebih berdampak pada kesejahteraan petani serta masyarakat secara luas.

Penggunaan indeks global relevan setidaknya karena tiga alasan. Pertama, indeks global menyediakan titik banding yang lebih obyektif untuk menilai posisi Indonesia relatif terhadap negara-negara lain di ASEAN, India, dan Tiongkok, sehingga capaian nasional dapat ditempatkan dalam konteks pembelajaran kawasan untuk saling memotivasi. Kedua, indeks-indeks tersebut dirancang untuk menangkap dimensi yang tidak selalu terlihat dalam statistik produksi, seperti resiliensi sistem pangan, efisiensi logistik, akses pangan, dan kualitas hasil pembangunan manusia. Ketiga, indeks global membantu menunjukkan apakah kemajuan pertanian Indonesia sudah cukup kuat untuk diterjemahkan menjadi perbaikan yang lebih luas dalam stabilitas pangan, daya saing, kualitas konsumsi, dan kesejahteraan rumah tangga rentan.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Naskah ini menelaah posisi pembangunan pertanian Indonesia melalui lima indeks global yang saling melengkapi, yaitu *Total Factor Productivity* (TFP), *Resilient Food Systems Index* (RFSI), *Logistics Performance Index* (LPI), *Prevalence of Undernourishment/Food Insecurity Experience Scale* (PoU/FIES), dan *Global Hunger Index* (GHI); untuk menilai kinerja sektor pertanian, ketahanan pangan, logistik, serta kesejahteraan secara lebih komprehensif.

Hasil telaah menunjukkan bahwa Indonesia tidak berada pada posisi terburuk dan pada beberapa indikator memperlihatkan kemajuan yang nyata, namun secara umum masih berada pada kelompok menengah dibandingkan negara-negara ASEAN, India, dan Tiongkok. Dari sisi hulu, produktivitas pertanian Indonesia meningkat, tetapi akselerasinya belum secepat Viet Nam, Kamboja, dan Tiongkok. Dari sisi sistem, fondasi ketahanan pangan nasional tergolong cukup baik, tetapi belum benar-benar kuat dalam menghadapi risiko iklim, gangguan rantai pasok, dan lemahnya konektivitas pasar. Dari sisi distribusi, logistik masih menjadi mata rantai lemah yang menahan efisiensi, menambah biaya pemasaran, dan mengurangi daya saing sektor pangan.

Sementara itu, dari sisi outcome, akses pangan masyarakat relatif lebih terjaga, tetapi penurunan kelaparan kronis, perbaikan mutu diet, dan pengurangan malnutrisi masih berlangsung lambat. Dengan demikian, pesan utama naskah ini adalah bahwa pembangunan pertanian Indonesia ke depan tidak cukup berorientasi pada peningkatan produksi semata, melainkan harus diarahkan pada percepatan produktivitas, penguatan resiliensi sistem pangan, reformasi logistik, keterjangkauan pangan bergizi, serta peningkatan kesejahteraan petani dan rumah tangga rentan agar pertanian benar-benar menjadi fondasi pembangunan manusia yang lebih luas dan berkelanjutan.

¹ Bahan dipersiapkan oleh: Sudi Mardianto, Wahida, Fany Ayu. Lestari, dan Natasya Wilma

Dalam naskah ini, indeks global tidak dipakai sebagai ukuran tunggal yang menggantikan indikator domestik, melainkan sebagai cermin pelengkap untuk membaca kekuatan dan celah pembangunan pertanian Indonesia secara lebih utuh. Dengan pendekatan ini, setiap indeks memberi sudut pandang yang berbeda tetapi saling melengkapi, mulai dari produktivitas usaha tani, ketangguhan sistem pangan, dan kualitas logistik, hingga akses pangan, kelaparan, dan mutu gizi. Melalui cara pandang tersebut, naskah ini berupaya menegaskan bahwa agenda pembangunan pertanian ke depan perlu dinilai bukan hanya dari besarnya output, tetapi juga dari kemampuannya menghasilkan kesejahteraan yang lebih luas dan berkelanjutan.

PENTINGNYA TELAHAH INDEKS GLOBAL SECARA TERPADU

Selama ini evaluasi sektor pertanian di Indonesia sering terlalu menekankan capaian produksi. Padahal, keberhasilan pertanian tidak cukup diukur dari seberapa besar output komoditas yang dihasilkan. Pertanian yang kuat harus mampu meningkatkan produktivitas penggunaan sumber daya, memperkuat ketahanan sistem pangan terhadap guncangan, menurunkan biaya logistik, menjaga akses pangan rumah tangga, dan pada akhirnya memperbaiki kesejahteraan petani serta masyarakat.

Karena itu, lima indeks yang dikaji perlu ditempatkan dalam satu rangkaian analisis yang utuh. *Total Factor Productivity* menjelaskan apakah pertanian Indonesia tumbuh melalui efisiensi dan inovasi. *Resilient Food Systems Index* menunjukkan apakah sistem pangan nasional cukup tangguh menghadapi disrupsi. *Logistics Performance Index* menjelaskan kemampuan distribusi dan konektivitas sistem. *Prevalence of Undernourishment (PoU)* dan *Food Insecurity Experience Scale (FIES)* menggambarkan hasil antara berupa kecukupan energi dan pengalaman akses pangan. Sementara *Global Hunger Index* memperlihatkan *outcome* yang lebih luas, yakni apakah pertanian dan sistem pangan benar-benar mampu menurunkan kelaparan dan malnutrisi.

Bila ditinjau secara terpisah, masing-masing indeks hanya menampilkan sebagian dari persoalan. Namun ketika ditelaah secara terpadu, terlihat dengan lebih jelas bahwa pekerjaan rumah Indonesia justru terbesar berada pada titik-titik penghubung antara produksi, distribusi, akses, dan kesejahteraan. Berikut uraian ringkas masing-masing indeks tersebut.

TFP: Produktivitas Pertanian Membaik, tetapi Belum Menjadi Motor Transformasi

Dari perspektif yang paling dekat dengan sektor pertanian, TFP memberi sinyal yang cukup positif. Sepanjang 2013–2023, indeks TFP pertanian Indonesia naik dari sekitar 97,8 menjadi 113,2 (Gambar 1). Ini menunjukkan bahwa pertanian Indonesia tidak hanya bertumbuh melalui penambahan input, tetapi juga melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas. Dalam konteks ASEAN plus India dan Tiongkok, posisi Indonesia tergolong menengah-atas; lebih baik daripada Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Timor-Leste (Tabel 1).

Namun, telaah yang lebih jernih memperlihatkan bahwa laju transformasi produktivitas Indonesia belum cukup cepat. Vietnam, Kamboja, dan Tiongkok menunjukkan akselerasi produktivitas yang lebih kuat. Artinya, Indonesia memang bergerak maju, tetapi belum berhasil menjadi *frontrunner* kawasan dalam efisiensi pertanian. Tantangan ini sangat penting karena tanpa pertumbuhan produktivitas yang cepat, kenaikan produksi akan terus bergantung pada perluasan areal, subsidi input, atau intervensi jangka pendek yang mahal dan sulit dipertahankan.

Implikasinya jelas bahwa agenda pertanian Indonesia perlu bergeser dari orientasi output jangka pendek menuju lompatan produktivitas jangka menengah. Itu berarti penguatan riset dan inovasi, percepatan adopsi teknologi di tingkat petani, pembenahan penyuluhan, peningkatan

kualitas benih dan budidaya, serta modernisasi sarana produksi harus menjadi inti kebijakan, bukan pelengkap. Data komposisi General Support to Sector (GSSE) OECD mengkonfirmasi, alokasi anggaran Indonesia untuk ilmu pengetahuan dan inovasi di bidang pertanian sangat kecil dibandingkan dengan Filipina, India, Vietnam dan China. Dukungan terhadap infrastruktur pertanian masih menduduki tempat tertinggi.

Pengayaan ulasan TFP juga penting dari sisi metodologi. Basis data produktivitas pertanian internasional USDA-ERS menekankan bahwa indeks TFP membandingkan pertumbuhan output terhadap gabungan input lahan, tenaga kerja, modal, dan material, sehingga lebih tepat digunakan untuk membaca kecepatan transformasi produktivitas daripada membandingkan “tingkat kemajuan” absolut antarnegara. Artinya, posisi Indonesia yang cukup baik pada 2023 tetap harus dibaca hati-hati. Indonesia memang lebih efisien daripada banyak negara pembanding, tetapi negara seperti Viet Nam, Kamboja, dan Tiongkok memperlihatkan laju transformasi yang lebih agresif. Bagi kebijakan pertanian, pesan ini penting karena peningkatan produktivitas jangka panjang hanya akan berkelanjutan bila ditopang oleh inovasi, penyuluhan, investasi irigasi, mekanisasi, kualitas benih, dan dukungan kelembagaan yang benar-benar sampai ke petani.

RSFI: Ketahanan Sistem Pangan Sudah Cukup Baik, Tetapi Belum Benar-Benar Resilien

Setelah melihat sisi produktivitas, perhatian berikutnya perlu bergeser ke kapasitas sistem pangan secara menyeluruh. Di sinilah RFSI 2026 memberi peringatan penting. Indonesia berada di peringkat 29 dari 60 negara dengan skor 66,52, sedikit di atas rata-rata global. Posisi ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki fondasi sistem pangan yang cukup, tetapi belum cukup kokoh untuk menghadapi gangguan besar secara konsisten.

Di tingkat Asia Tenggara, Indonesia berada di bawah Singapura dan Malaysia, tetapi di atas Viet Nam, Filipina, dan Thailand (Tabel 2). Ini menempatkan Indonesia pada posisi menengah-atas di kawasan, namun belum menjadi *benchmark* regional. Bagi negara sebesar Indonesia, posisi seperti ini tidak dapat diperlakukan sebagai capaian akhir. Justru karena Indonesia adalah produsen pangan besar, tuntutan terhadap ketangguhan sistem pangan semestinya lebih tinggi.

Pesan paling tajam dari RFSI adalah bahwa kelemahan global justru terletak pada *availability* dan *climate risk responsiveness*. Temuan ini sangat relevan bagi Indonesia. Masalah Indonesia ke depan bukan hanya soal memproduksi pangan, tetapi apakah sistem pangan mampu bertahan saat iklim berubah, serangan organisme pengganggu meningkat, rantai pasok terganggu, atau biaya distribusi melonjak. Karena itu, pertanian Indonesia harus dibangun sebagai bagian dari sistem pangan yang resilien, bukan hanya sebagai mesin produksi komoditas. Kemampuan suatu negara dalam mengurangi susut dan limbah pangan (*food loss and waste*-FLW) melengkapi pengukuran RSFI. Catatan penting terkait isu FLW diantaranya di tataran global tercatat 1 milyar ton pangan mengalami susut atau menjadi limbah setiap tahunnya. Dampak di tingkat global dari pemanfaatan sumber daya pertanian, 25 persen sumber daya air untuk pertanian terbuang, 25 persen pupuk tidak termanfaatkan optimal, dan FLW berkontribusi terhadap 8-10 persen emisi GRK.

Tambahan penting dari RFSI 2026 adalah bahwa dunia sangat bergantung pada segelintir “jangkar pangan” global. *Economist Impact* mencatat bahwa hanya 15 negara menghasilkan sekitar 70 persen pangan dunia, dan 11 di antaranya juga termasuk 15 eksportir pangan terbesar. Indonesia termasuk dalam kelompok strategis tersebut. Konsekuensinya, penguatan sistem pangan Indonesia tidak hanya penting bagi ketahanan domestik, tetapi juga memiliki implikasi regional dan global. Namun laporan yang sama menegaskan bahwa bahkan negara produsen besar pun belum kebal terhadap guncangan. Karena itu, ukuran keberhasilan Indonesia ke depan tidak cukup hanya dari

besarnya produksi, tetapi juga dari kemampuan sistem pangan mengelola risiko iklim, menjaga pasokan tetap andal, dan memastikan petani kecil terhubung ke pasar serta layanan dasar.

Logistik Menjadi Mata Rantai Lemah yang Menahan Dampak Pertanian

Tantangan resiliensi sistem pangan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari persoalan logistik. Hasil LPI 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat 61 dari 139 negara dengan skor 3,0. Di kawasan pembandingan, Indonesia masih tertinggal dari Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Viet Nam, India, dan Tiongkok (Tabel 3). Posisi Indonesia memang lebih baik daripada Kamboja dan Laos, tetapi belum cukup untuk menopang ambisi menjadi negara dengan sistem pangan yang efisien dan berdaya saing.

Bila ditelusuri lebih dalam, kelemahan Indonesia terutama berada pada *customs*, *infrastructure*, dan *logistics competence*. Dari sudut pandang pertanian, ini berarti biaya distribusi input masih tinggi, pemasaran hasil belum cukup efisien, kehilangan hasil pascapanen sulit ditekan, dan konektivitas antara sentra produksi dengan pasar masih belum optimal. Dalam negara kepulauan seperti Indonesia, logistik bukan isu teknis yang berdiri sendiri; karena langsung menentukan pendapatan petani, keterjangkauan harga bagi konsumen, dan stabilitas pasokan antarwilayah.

Karena itu, perbaikan sektor pertanian tidak akan berdampak penuh bila reformasi logistik tertinggal. Produksi yang meningkat tidak otomatis menaikkan kesejahteraan petani jika biaya angkut tinggi, akses pasar lemah, rantai dingin terbatas, dan informasi harga tidak simetris. Dalam banyak kasus, justru di titik inilah keuntungan petani tergerus dan harga pangan di konsumen tetap mahal.

Dari perspektif Bank Dunia, isu kuncinya bukan sekadar kecepatan pengiriman, melainkan keandalan (*reliability*). LPI 2023 lahir setelah tiga tahun gangguan rantai pasok global dan menegaskan bahwa negara yang lebih kompetitif logistiknya umumnya ditopang oleh *clearance* yang efisien, digitalisasi rantai pasok, serta infrastruktur transportasi dan pergudangan yang konsisten. Bagi Indonesia, pesan ini sangat relevan untuk sektor pertanian karena biaya logistik yang tinggi pada akhirnya dipikul oleh petani dan konsumen. Tanpa pembenahan logistik, keuntungan dari peningkatan produksi sering tergerus oleh biaya distribusi, kehilangan hasil, dan ketidakstabilan harga antardaerah.

Akses Pangan Relatif Terjaga, tetapi Kelaparan Kronis Turun Lambat

Pada level *outcome* antara, PoU dan FIES memperlihatkan gambaran yang agak berbeda namun sama-sama menuju ke arah tren positif (Gambar 3). Indonesia mencatat kemajuan pada kedua indikator, tetapi dengan karakter yang berbeda. PoU Indonesia turun dari 7,1 persen pada 2014/16 menjadi 6,0 persen pada 2022/24. Ini arah yang positif, tetapi Indonesia masih berada di lapisan menengah dan tertinggal dari Thailand, Viet Nam, Kamboja, Filipina, Malaysia, dan Tiongkok (Tabel 4). Artinya, penurunan kekurangan konsumsi energi kronis di Indonesia berjalan, tetapi belum cepat.

Sebaliknya, pada FIES berat, Indonesia justru tampil relatif kuat. Nilainya turun dari 6,0 persen menjadi 4,5 persen dan merupakan yang terbaik di antara negara pembandingan yang tersedia datanya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia relatif berhasil menjaga agar rumah tangga tidak jatuh ke kondisi keterbatasan akses pangan yang sangat berat. Capaian ini penting, kemungkinan ditopang oleh kombinasi stabilisasi pasokan, intervensi harga, dan perlindungan sosial.

Namun, perbedaan antara PoU dan FIES justru menyampaikan pesan kebijakan yang penting. Indonesia tampaknya lebih baik dalam menahan guncangan akses pangan akut, tetapi belum cukup cepat mengatasi persoalan yang lebih struktural, yaitu kecukupan energi, keterjangkauan pangan bergizi, kualitas konsumsi, dan ketimpangan kemampuan membeli pangan antarkelompok rumah tangga.

SOFI 2025 memberi konteks tambahan yang penting untuk menempatkan posisi Indonesia secara lebih tepat. Laporan tersebut menegaskan bahwa inflasi harga pangan yang tinggi dapat dengan cepat memperburuk *food insecurity* dan menggerus keterjangkauan diet sehat, terutama bagi rumah tangga miskin, perempuan, dan penduduk perdesaan. Ini berarti capaian Indonesia pada FIES yang relatif baik, tidak boleh dipandang sebagai kondisi yang sudah aman. Bila tekanan harga pangan meningkat dan pendapatan rumah tangga melemah, akses pangan yang selama ini relatif terjaga dapat dengan cepat memburuk. Karena itu, kebijakan pertanian perlu semakin erat dihubungkan dengan stabilisasi harga, perlindungan sosial adaptif, dan peningkatan daya beli rumah tangga rentan.

Kelaparan dan Malnutrisi Masih Menjadi Tantangan Struktural

Pesan bahwa pekerjaan rumah Indonesia masih besar terlihat makin jelas pada *Global Hunger Index 2025*. Skor Indonesia berada pada 14,6 dan masih termasuk kategori moderat. Dibandingkan 2016, posisi ini memang membaik (Gambar 4). Namun dalam konteks kawasan, Indonesia masih tertinggal dari Thailand, Viet Nam, Filipina, dan Malaysia. Indonesia hanya sedikit lebih baik daripada Kamboja dan Myanmar, serta jauh lebih baik dari Timor-Leste (Tabel 6).

Yang perlu digarisbawahi, GHI tidak hanya mencerminkan kekurangan pangan, tetapi juga menggabungkan dimensi *undernourishment*, *child stunting*, *child wasting*, dan *child mortality*. Karena itu, skor Indonesia yang masih moderat berarti persoalan Indonesia bukan semata-mata terletak pada ketersediaan pangan nasional. Tantangannya juga mencakup kualitas diet, gizi anak, layanan kesehatan dasar, sanitasi, dan kemampuan sistem sosial-ekonomi melindungi kelompok rentan.

Dari sudut pandang kebijakan pertanian, ini adalah peringatan bahwa produksi yang meningkat tidak otomatis menghasilkan perbaikan gizi. Pertanian harus terhubung dengan agenda yang lebih luas: diversifikasi pangan, keterjangkauan protein hewani dan hortikultura, stabilisasi harga pangan bergizi, serta penguatan pendapatan rumah tangga miskin. Tanpa itu, pertanian dapat bertumbuh tetapi dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat tetap terbatas.

Pengayaan lain yang perlu ditekankan adalah bahwa GHI menggabungkan empat komponen yang bobotnya tidak kecil untuk aspek gizi anak dan kesehatan, yakni *undernourishment*, *child stunting*, *child wasting*, dan *child mortality*. Dengan demikian, posisi Indonesia yang masih berada pada kategori moderat menunjukkan bahwa pekerjaan rumah sektor pertanian tidak berhenti pada kecukupan produksi, tetapi juga menyangkut kualitas diet, akses rumah tangga miskin terhadap pangan bergizi, sanitasi, layanan kesehatan, dan perlindungan anak. Dari sudut pandang kebijakan, ini memperkuat argumen bahwa pembangunan pertanian harus dipandang sebagai bagian dari agenda besar pembangunan manusia, bukan sekadar agenda produksi komoditas.

MAKNA BESAR BAGI PEMBANGUNAN PERTANIAN INDONESIA

Bila keseluruhan temuan tersebut dirangkai secara utuh, terlihat bahwa Indonesia menghadapi masalah berlapis. Tantangan pertama ada di hulu, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian secara lebih cepat dan merata serta meningkatkan peran teknologi dan inovasi pertanian dalam proses produksi. Tantangan kedua ada di tingkat sistem, yaitu bagaimana memastikan produksi yang lebih tinggi ditopang oleh logistik, distribusi, konektivitas pasar, dan manajemen risiko iklim yang kuat. Tantangan ketiga ada di hilir, yaitu bagaimana memastikan seluruh perbaikan itu benar-benar menurunkan kelaparan, memperbaiki mutu konsumsi, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta rumah tangga rentan.

Inilah sebabnya mengapa kebijakan pertanian Indonesia ke depan tidak cukup hanya berorientasi pada swasembada atau volume produksi. Keberhasilan pertanian harus diukur dari sejauh mana ia mempercepat produktivitas, menekan biaya logistik, memperluas keterjangkauan pangan bergizi, mengurangi kerentanan terhadap guncangan, dan menaikkan pendapatan petani secara nyata. Dengan kata lain, pembangunan pertanian harus dinilai dari kemampuan menciptakan kesejahteraan, bukan semata menghasilkan output.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi utama sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan produktivitas pertanian melalui penguatan riset, difusi inovasi, modernisasi alat dan mesin, perbaikan layanan penyuluhan, serta efisiensi penggunaan input.
2. Menjadikan resiliensi sistem pangan sebagai kerangka utama pembangunan pertanian, dengan fokus pada manajemen air, respons risiko iklim, pengendalian hama dan penyakit, serta perlindungan terhadap gangguan rantai pasok.
3. Mempercepat reformasi logistik pangan melalui penguatan infrastruktur transportasi, *cold chain*, digitalisasi rantai pasok, perbaikan *customs* dan tata niaga, serta peningkatan konektivitas sentra produksi dengan pasar.
4. Mensinergikan kebijakan pertanian dengan agenda gizi dan perlindungan sosial, sehingga keberhasilan produksi diterjemahkan menjadi konsumsi pangan yang lebih cukup, lebih beragam, dan lebih bergizi.
5. Menjadikan kesejahteraan petani sebagai indikator utama keberhasilan, termasuk melalui perbaikan posisi tawar, akses pembiayaan, efisiensi rantai pemasaran, dan penciptaan nilai tambah di perdesaan.
6. Apabila dikaitkan dengan masing-masing indeks, rekomendasi kebijakannya dapat dilihat pada Matrik rekomendasi sebagai berikut.

Matrik rekomendasi utama masing-masing indeks

Indeks	Posisi Indonesia	Makna Utama	Pesan Kebijakan
Total Factor Productivity	Menengah-atas	Produktivitas pertanian meningkat, tetapi akselerasinya belum secepat Viet Nam, Kamboja, dan Tiongkok.	Fokus pada inovasi, adopsi teknologi, penyuluhan, dan efisiensi penggunaan input.
Resilient Food Systems Index	Menengah global; menengah-atas regional	Fondasi ketahanan sistem pangan cukup baik, tetapi belum kuat menghadapi guncangan iklim dan gangguan pasok.	Perkuat logistik, cold chain, konektivitas pasar, dan respons risiko iklim.
Logistics Performance Index	Menengah-bawah regional	Distribusi, kepastian, infrastruktur, dan kompetensi logistik masih menahan daya saing pangan.	Tekan biaya distribusi dan hubungkan sentra produksi ke pasar secara lebih andal.
PoU dan FIES	Menengah pada PoU; relatif kuat pada FIES berat	Akses pangan relatif terjaga, tetapi kelaparan kronis masih turun lambat.	Gabungkan stabilisasi harga dengan peningkatan pendapatan dan keterjangkauan pangan bergizi.
Global Hunger Index	Menengah regional	Masalah gizi, stunting, wasting, dan kualitas konsumsi belum sepenuhnya tuntas.	Arahkan pembangunan pertanian agar berdampak pada mutu diet dan kesejahteraan kelompok rentan.

Tabel 1. Posisi Indonesia dan negara pembanding pada Total Factor Productivity (TFP) pertanian, 2023

Negara	Indeks TFP	Posisi relatif terhadap Indonesia
Indonesia	113,2	—
Viet Nam	124,1	di atas
Kamboja	114,5	di atas
Tiongkok	115,7	di atas
India	113,5	sedikit di atas
Thailand	102,2	di bawah
Malaysia	96,7	di bawah
Filipina	95,8	di bawah
Myanmar	89,1	di bawah
Timor-Leste	78,7	di bawah

Sumber: USDA, 2026

Tabel 2. Posisi Indonesia dan negara pembanding pada *Resilient Food Systems Index*, 2026

Negara	Peringkat	Skor
Singapura	9	73,00
Malaysia	10	72,98
Indonesia	29	66,52
Viet Nam	31	64,72
Filipina	34	63,82
Thailand	44	57,66

Sumber: RSFI, 2026

Tabel 3. Posisi Indonesia dan negara pembanding pada *Logistics Performance Index*, 2023

Negara	Peringkat	Skor
Singapura	1	4,3
Tiongkok	19	3,7
Malaysia	26	3,6
Thailand	34	3,5
India	38	3,4
Filipina	43	3,3
Viet Nam	43	3,3
Indonesia	61	3,0
Kamboja	115	2,4
Lao PDR	115	2,4

Sumber: Logistics Performance Index, World Bank

Tabel 4. Posisi Indonesia dan negara pembanding pada PoU, 2022/24

Negara	PoU 2022/24 (%)
Tiongkok	<2,5
Malaysia	<2,5
Filipina	3,0
Thailand	4,6
Kamboja	5,2
Viet Nam	5,3
Myanmar	5,4
Indonesia	6,0
India	12,0
Timor-Leste	18,7

Sumber: FAO, 2026

Tabel 5. Posisi Indonesia dan negara pembanding pada FIES berat, 2022/24

Negara	FIES berat 2022/24 (%)
Indonesia	4,5
Thailand	5,4
Viet Nam	10,7
Malaysia	16,7
Myanmar	32,7
Filipina	32,9
Kamboja	40,0
Timor-Leste	n.a.
India	n.a.
Tiongkok	n.a.

Sumber: FAO, 2026

Tabel 6. Posisi Indonesia dan negara pembanding pada Global Hunger Index (GHI) 2025

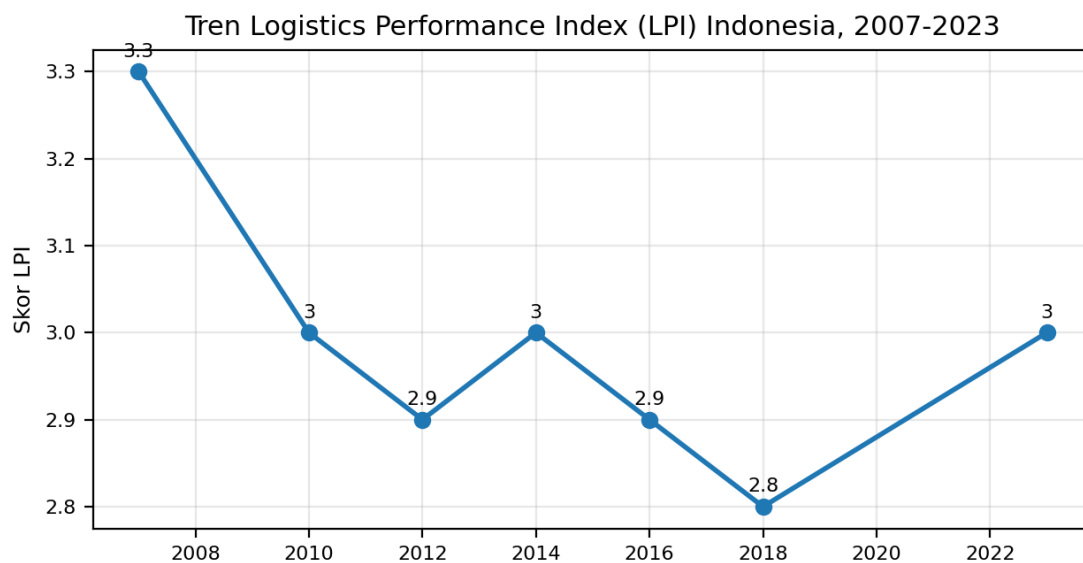
Negara	Skor GHI 2025	Kategori
Tiongkok	<5	low
Thailand	9,7	low
Viet Nam	11,1	moderate
Filipina	13,4	moderate
Malaysia	13,6	moderate
Indonesia	14,6	moderate
Kamboja	14,9	moderate
Myanmar	15,3	moderate
India	25,8	serious
Timor-Leste	28,0	serious

Sumber:GHI, 2025

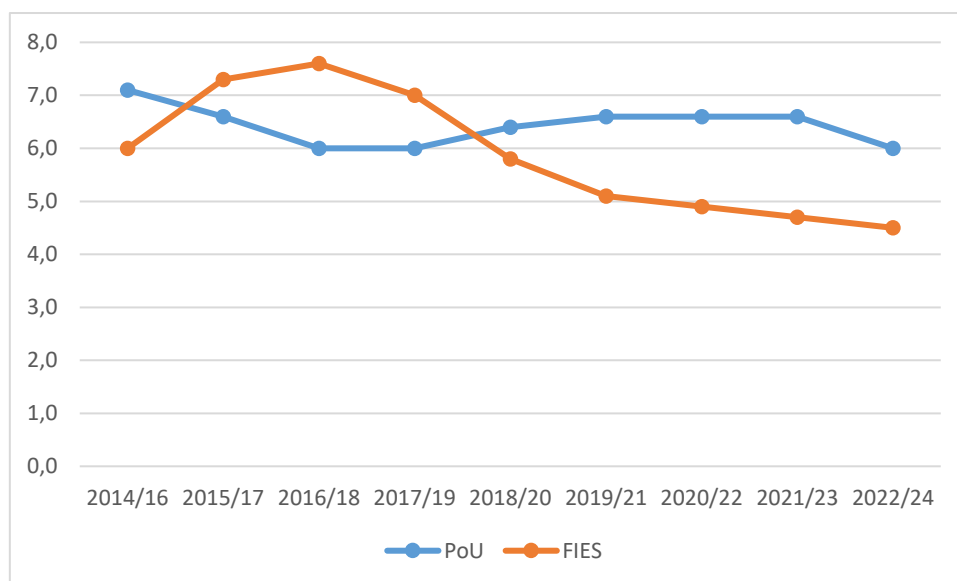


Gambar 1. Perubahan Total Factor Productivity (TFP) pertanian Indonesia, 2013-2023

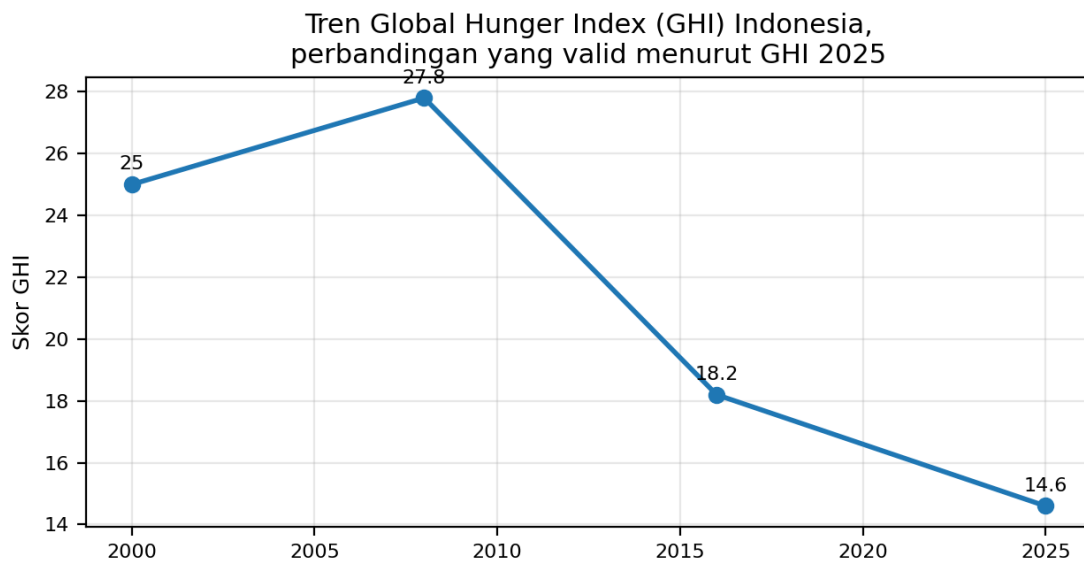
Sumber: USDA, 2026



Gambar 2. Tren Logistics Performance Index (LPI) Indonesia
Sumber: World Bank Logistics Performance Index, 2007-2023.



Gambar 3. Tren PoU dan FIES berat Indonesia
Sumber: FAO



Gambar 4. Tren skor Global Hunger Index (GHI) Indonesia

Sumber: Global Hunger Index 2025